

Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris

by Azwardi Azwardi

Submission date: 28-Mar-2023 01:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 2048848944

File name: Buku_INDIKATOR_2_merged.pdf (600.54K)

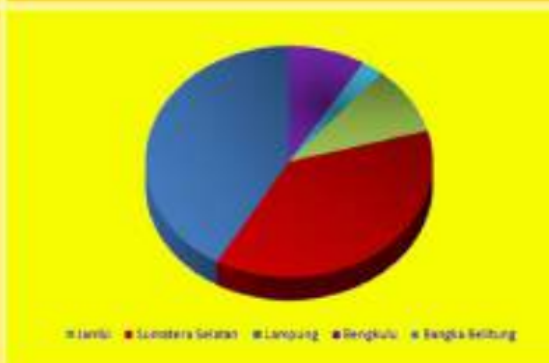
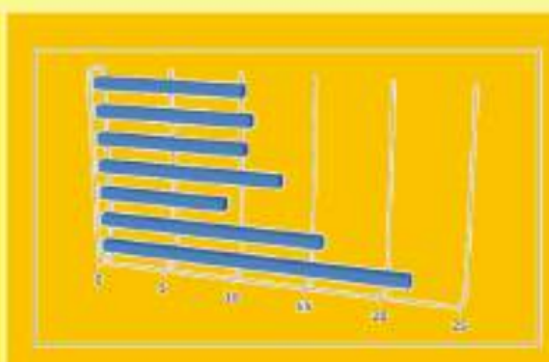
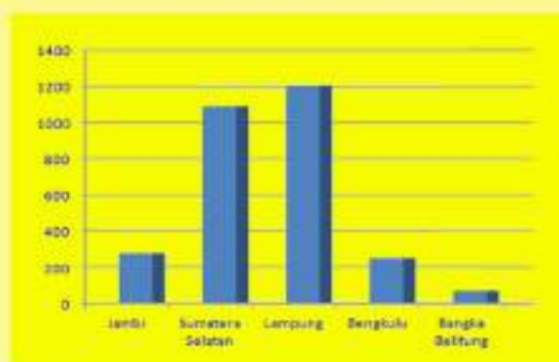
Word count: 6260

Character count: 42206



Laboratorium Aplikasi Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH : TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS



Editor : Imelda, S.E., M.S.E

**INDIKATOR PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH :
TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

**Sanksi pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997
Pasal 44 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

6
**INDIKATOR PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH :
TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

Tim Penulis



6

INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH : TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS

Tim Penulis

7

UPT. Penerbit dan Percetakan
Universitas Sriwijaya 2021
Kampus Unsri Palembang
Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139
Telp. 0711-360969
email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com
website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 026/KTA/APPTI/X/2015

Anggota IKAPI No. 001/SMS/2009

Setting cover: Anggita Feisabella Rizanti

Setting & Lay Out Isi : Devi

Cetakan Pertama, Januari 20⁸

xiv + 252 halaman : 16 x 24 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN : 978-979-587-913-8

KATA SAMBUTAN

Syukur Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT, dan karunia-Nya penyusunan buku yang berjudul “Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris” dapat terselesaikan. Saya selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya menyambut dengan baik dan penuh rasa syukur atas terbitnya buku ini. Adanya buku ini merupakan suatu kehormatan dan



Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.,
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Sriwijaya

kebanggaan bagi saya karena melalui buku ini Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dapat diperkenalkan. Buku “Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris” merupakan hal penting, karena buku ini dapat menjadi sumber informasi mengenai pengukuran dalam menganalisis berbagai indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah dan dilengkapi dengan berbagai tinjauan Pustaka baik teoritis maupun empiris. Pada kesempatan ini, saya haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini, yang telah memberikan bantuan baik secara moral maupun materil.

Akhir kata, semoga buku “Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris” bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Januari 2021

Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.

KATA PENGANTAR

Pembangunan ekonomi merupakan hal penting yang harus diperhitungkan karena pembangunan ekonomi mengindikasikan keberhasilan suatu negara. Pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi, yang mana kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dapat menggunakan otonomi daerah sebagai cara terbaik, karena kemandirian dalam melaksanakan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Buku ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian pertama menyajikan berbagai pengukuran yang digunakan untuk menganalisis pembangunan ekonomi dan kinerja keuangan daerah. Penyajiannya secara ringkas meliputi konsep dan defenisi dasar, formulasi dan contoh perhitungan yang dilengkapi dengan contoh data dan interpretasinya. Pada bagian kedua, buku ini menyajikan berbagai tinjauan literatur baik secara teoritis maupun empiris yaitu lingkungan dan pembangunan, upah tenaga kerja, aglomerasi industri, efisiensi perbankan, perkembangan inklusi keuangan, struktur ekonomi serta keuangan desa.

Buku ini terdiri dari 8 bab, bab 1 membahas mengenai analisis ekonomi daerah yang menyajikan informasi tentang dasar-dasar ekonomi wilayah serta perhitungan PDRB juga produktivitas ekonomi. Pada bab 2 membahas mengenai analisis keuangan daerah yang meliputi konsep keuangan daerah, komposisi APBD serta

penilaian kinerja keuangan daerah. Bab 3 membahas mengenai lingkungan dan pembangunan, yang meliputi hubungan antara lingkungan dan pembangunan, pembangunan berkelanjutan serta kebijakan yang digunakan untuk melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Bab 4 membahas mengenai determinan dan struktur upah pekerja.

Pada bab 5 membahas mengenai potensi aglomerasi industri kecil di Sumatera Selatan baik ditinjau dari skala ekonomi, biaya bahan baku dan pemasaran serta upah pekerja. Bab 6 menyajikan informasi mengenai efisiensi perbankan. Bab 7 membahas mengenai perkembangan inklusi keuangan Sumatera Selatan. Bab 8 membahas mengenai dana desa serta kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan dan perkembangan wilayah.

Buku ini dikemas sedemikian rupa agar dapat memudahkan para pembaca dalam memahami Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu proses penyusunan buku ini, yang telah bersedia menyumbangkan ide, pikiran, waktu dan tenaga sehingga pada akhirnya buku ini dapat selesai dan diterbitkan. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I Analisis Ekonomi Daerah	
Imelda, M. Deassy Apriani, Anggita Feisabella Rizanti, Mega Debiyanti.....	1
BAB II Analisis Keuangan Daerah	
Azwardi, Imelda, Kurnia Sari, Nadiya Angraini	43
BAB III Lingkungan dan Pembangunan	
Abdul Bashir, Mukhlis, Bambang Bemby Soebyakto, Ichsan Hamidi	79
BAB IV Upah Pekerja: Determinan dan Struktur	
Yunisvita	103
BAB V Aglomerasi Industri: Telaah Prospek Untuk Industri Kecil di Sumatera Selatan	
Mukhlis, Bernadette Robiani, Dirta Pratama Atiyatna, Hamira	151
BAB VI Efisiensi Perbankan	
Suhel	181
BAB VII Perkembangan Inklusi Keuangan Sumatera Selatan	
Sri Andaiyani dan Ariodillah Hidayat	217
BAB VIII Dana Desa: Perspektif Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Wilayah	
 Sukanto, Azwardi, Wika Indriyani	227

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Contoh PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019....	7
Tabel 1.2 Contoh PDB Indonesia Atas Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2007-2019	9
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk dan PDRB Kota Palembang	11
Tabel 1.4 PDRB Provinsi Lampung dan PDRB Kota Bandar Lampung	16
Tabel 1.5 Contoh Struktur PDB Indonesia Menurut Lapangan Usaha (%) tahun 2015-2019	18
Tabel 1.6 Tahapan pembangunan dan Kontribusi Sektoral terhadap PDB	19
Tabel 1.7 Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah	28
Tabel 1.8 Perhitungan Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018	29
Tabel 1.9 Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah	30
Tabel 1.10 Kriteria Tipologi Klassen untuk Klasifikasi Kinerja Sektor I di suatu Wilayah	31
Tabel 2.1 Komposisi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	50
Tabel 2.2 Perkembangan APBD dan Jumlah Penduduk Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2018-2019	55
Tabel 2.3 Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD untuk Provinsi Se-Sumbagsel	56

Tabel 2.4 Perbandingan Rata-rata Rasio Pertumbuhan APDB dan Rata-rata Rasio APBD Per Kapita di Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019	58
Tabel 2.5 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)	60
Tabel 2.6 Klasifikasi Indeks Kemandirian Wilayah	62
Tabel 2.7 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)	63
Tabel 2.8 Penghitungan Elastitas PAD Provinsi Lampung Tahun 2018-2019	65
Tabel 2.9 Penghitungan Share PAD Provinsi Lampung Tahun 2019	66
Tabel 2.10 Penghitungan Growth PAD Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 (Rupiah)	66
Tabel 2.11 Perbandingan rata-rata <i>share</i> PAD dan <i>Growth</i> PAD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019	67
Tabel 2.12 Klasifikasi Kinerja Pembiayaan Pembangunan Wilayah	70
Tabel 2.13 Perkembangan Belanja Pembangunan dan Total Belanja Daerah Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)	70
Tabel 2.14 Klasifikasi Rasio Efektifitas	72
Tabel 2.15 Klasifikasi Rasio Efisiensi	73

Tabel 2.16 Perhitungan Rasio Efektivitas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019	73
Tabel 2.17 Perhitungan Rasio Efisiensi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019 (Rupiah)	74
Tabel 2.18 Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah) ..	75
Tabel 5.1 Indikator ⁶ Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	171
Tabel 7.1 Hasil Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan di Sumatera Selatan	223
Tabel 8.1 Perkembangan Tipologi Desa di Indonesia Tahun 2015 dan 2020	243
Tabel 8.2 Perkembangan Tipologi Desa di Regional Sumatera 2018 dan 2020	244

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah	45
Gambar 2.2 Tipologi Kinerja APBD	57
Gambar 2.3 Tipologi Kinerja APBD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019	58
Gambar 2.4 Kriteria Share and Growth	65
Gambar 2.5 Analisa Kriteria Share and Growth Provinsi Lampung Tahun 2018-2019	68
Gambar 3.1 Hubungan antara Degradasi Lingkungan dan Pembangunan	87
Gambar 3.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan	91
Gambar 4.1 Upah Rata-rata per Jam berdasarkan tingkat Pendidikan Pekerja	141
Gambar 4.2 Upah Rata-rata per Jam berdasarkan Gender Pekerja ..	142
Gambar 4.3 Rata-rata Upah Laki-laki Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama	143
Gambar 4.4 Rata-rata Upah Perempuan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama	143
Gambar 5.1 Pertumbuhan Industri Kecil di Indonesia	152
Gambar 5.2 Pangsa IK terhadap PDB Harga Berlaku Indonesia, 2019	152
Gambar 5.3 Pangsa IK terhadap PDB Harga Konstan Indonesia 2019	152
Gambar 5.4 Perkembangan Unit Usaha Industri Kecil di Sumatera Selatan, 2009-2019	153

Gambar 5.5 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil di Sumatera Selatan 2009-2019	154
Gambar 5.6 Dukungan Skala Ekonomi terhadap Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	163
Gambar 5.7 Sistem Pengupahan pada Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	165
Gambar 5.8 Dukungan Upah terhadap Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	165
Gambar 5.9 Dukungan Biaya Bahan Baku dan Pemasaran terhadap Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	167
Gambar 6.1 Efisiensi Teknik dan Efisiensi Alokatif	184
Gambar 6.2 Kerangka Konseptual Efisiensi Perbankan	187
Gambar 8.1 Tren Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2020 (Persen)	230
Gambar 8.2 Rincian Dana Desa Tahun 2015-2020 (Triliun Rupiah)	231
Gambar 8.3 Sebaran Koefisien Dana Desa terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten	240
Gambar 8.4 Sebaran Koefisien Dana Desa terhadap Kemiskinan di kabupaten Muara Enim	241

BAB VIII
DANA DESA: PERSPEKTIF PENGENTASAN
KEMISKINAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Oleh:

Sukanto, Azwardi dan Wika Indriani

1. Pendahuluan

Sejak kemerdekaan, dekotomi pembangunan daerah selalu menjadi batu sandungan dalam proses pembangunan itu sendiri. Selama ini, pembangunan yang dilakukan cenderung ke wilayah perkotaan dibandingkan wilayah perdesaan atau dikatakan sebagai *urban bias* (chambers, 1987), dan mengejar pertumbuhan ekonomi. Tidak heran kalau kemajuan wilayah perkotaan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan. Namun, fokus pembangunan pada wilayah perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya sektor industri tidak disertai oleh transformasi sektor pertanian ke industri. Konsekuensinya terjadi dekotomi antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia, antar Pulau Jawa-Luar Jawa, Kawasan Wilayah Perbatasan, dan Desa-Kota. Proses pembangunan ini menyebabkan jebakan kemiskinan di wilayah-wilayah perdesaan (Fauzi, 2010).

Pemerintah sangat fokus memperhatikan kondisi tersebut, hal ini ditandai dengan mulainya pembangunan wilayah-wilayah pinggiran (*periphery*) sejak tahun 1990-an. Beberapa program dilakukan pemerintah seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT),

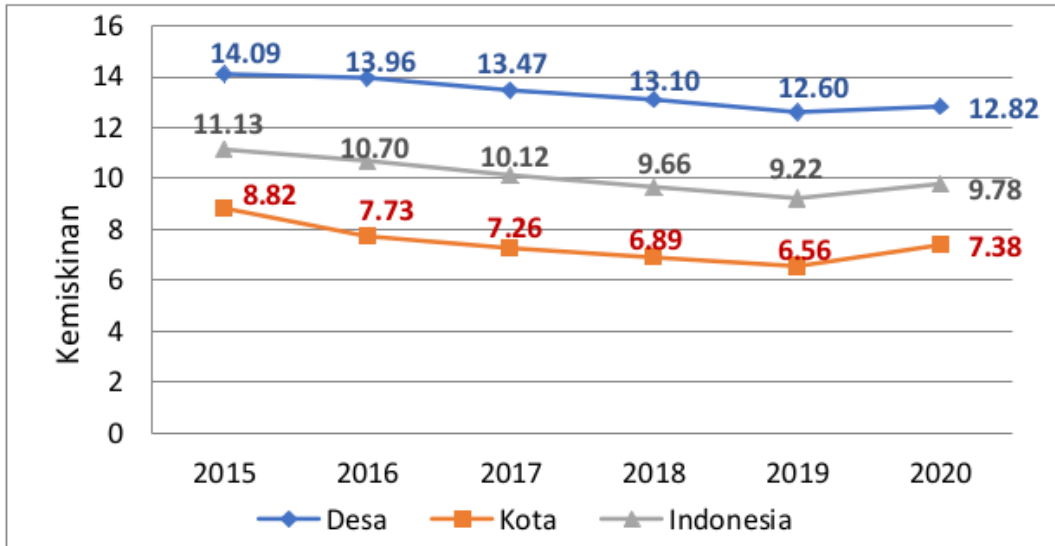
Program Pengembangan Terpadu Antar Desa, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (*PNPM*) Mandiri, Alokasi Dana Desa. Program-program diluncurkan oleh pemerintah guna mengembangkan wilayah perdesaan untuk mempersempit disparitas desa-kota sehingga diharapkan sebagian masalah perdesaan dapat diatasi. Namun, pembangunan desa yang dilakukan masih menjadikan desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menyebabkan beberapa program tersebut menjadi belum optimal. Perhatian besar terhadap kemajuan desa dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi desa sehingga muncul slogan **desa membangun** sebagai otokritik terhadap **membangun desa**.

Pembangunan wilayah perdesaan ¹⁰ dinilai sangat berpotensi dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan, baik dari aspek ekonomis, politis, maupun sosial masyarakat. Dalam upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan Pembangunan wilayah perdesaan diperkuat oleh pemerintahan Jokowi melalui Program Nawacita, salah satunya membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gurning, 2020:1).

Masalah kesenjangan dan kemiskinan menjadi isu sentral dalam setiap rezim. Data Badan Pusat Statistik, menunjukkan jumlah penduduk miskin sebesar 26,42 juta jiwa sementara itu, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan sebesar 11,16 juta jiwa (7,38

persen) pada bulan maret 2020 dan penduduk miskin wilayah perdesaan sebesar 15,26 juta jiwa (12,82 persen) pada bulan maret 2020.

Secara lebih umum tren kemiskinan di wilayah perdesaan, dan perkotaan di Indonesia pada tahun 2015-2019 menunjukkan penurunan (Gambar 1.1), akan tetapi memasuki tahun 2020 persentase penduduk miskin terlihat meningkat. Secara detail dapat digambarkan, tahun 2015, terdapat 28,51 juta jiwa atau sebesar 11,13 persen penduduk miskin di Indonesia. Memasuki tahun 2018, persentase penduduk miskin menurun satu digit yaitu sebesar 9,66 persen, demikian pula tahun 2019 sebesar 9,22 persen, dan tahun 2020, tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen. Kondisi ini disebabkan oleh adanya permasalahan pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum menunjukkan tren penurunan sehingga pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah dan melakukan pekerjaan secara *Work From Home* (WFH) dan melakukan aktivitas terbatas di luar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak, hal ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal. *Trade-off* kebijakan PSBB dirasakan dampaknya oleh pekerja sektor informal seperti pedagang kecil, satu sisi harus tetap berada dirumah, namun sisi lain harus memenuhi kebutuhan hidupnya.



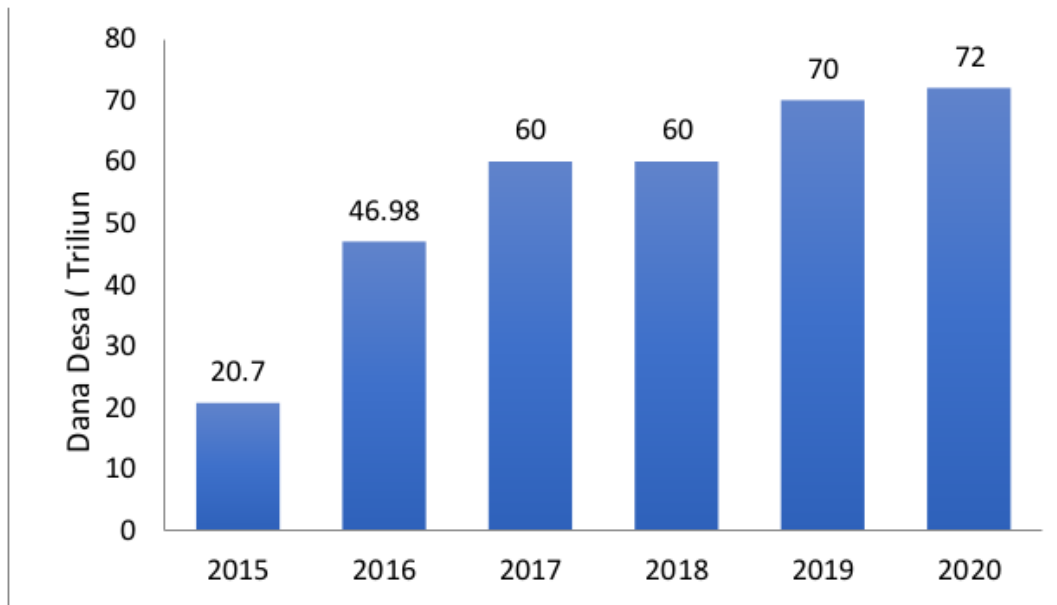
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 8.1 Tren Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2020 (persen)

Bila dilihat secara spasial antara desa-kota kemiskinan di desa relatif lebih tinggi. Pada tahun 2015 kemiskinan di desa sebesar 14,09 persen dan menurun menjadi 12,60 persen sedangkan kemiskinan di perkotaan pada periode yang sama masing-masing sebesar 8,82 persen dan 6,56 persen. Fakta ini sekaligus menguatkan bahwa adanya ketimpangan antar wilayah desa-kota.

Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa memiliki posisi yang strategis dalam basis pembangunan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia menciptakan implikasi berupa kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ke pemerintah Desa. Dalam kerangka membangun otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan Desa menjadi kewenangan desa, termasuk dalam hal pengolahan keuangan desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga menjadikan desa sebagai prioritas pembangunan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian Desa melalui program-program dan kegiatan pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa (Arfiansyah, 2020:3).



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015-2020

Gambar 8.2 Rincian Dana Desa Tahun 2015-2020 (Triliun Rupiah)

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan Dana Desa dari tahun 2015-2020, secara umum jumlah dana desa mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata peningkatan sebesar 34,8 persen per tahun. Pada tahun 2015, Dana Desa sebesar 20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 Juta, dan tahun 2017 kembali meningkat menjadi sebesar Rp 60 triliun dengan

rata-tara setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 720 Juta. Kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp 72 triliun dengan alokasi perdesa sebesar Rp 662 Juta (Kemenkeu, 2017). Besaran jumlah dana desa yang dikucurkan ke desa diyakini akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan mampu berkontribusi dalam pengembangan wilayah desa.

2. Tinjauan Literatur

Pendekatan pengembangan wilayah lebih bersifat *spatial* dan menjadi jembatan untuk melihat apakah perencanaan yang dilakukan selaras dengan tata ruang (Muta'ali, 2014). Perkembangan wilayah desa dapat menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sektoral dan regional. Dalam pengertian pengembangan wilayah dalam kajian ini dilihat dari aspek peningkatan status desa. Status desa menggunakan IDM relatif telah mencerminkan pengembangan wilayah berdasarkan dua pendekatan tersebut. Sementara itu, Lowe *et.al* (1998) mengungkapkan pembangunan perdesaan yang bersifat *endogenous*. Ciri pembangunan dengan menggunakan pendekatan ini adalah: prinsip kunci SDA yang spesifik, menjadi faktor penentu pembangunan berkelanjutan, adanya kekuatan dinamis berupa inisiatif lokal dan kewirausahaan, fungsi wilayah perdesaan berupa layanan yang beragam, pengembangan kapasitas dan mengatasi *social exclusion* (keterasingan sosial), dan identifikasi masalah perdesaan seperti adanya keterbatasan kapasitas.

Deaton & Nelson (1992) mengembangkan teori pembangunan desa, dimana pembangunan diartikan sebagai alokasi fisik, sosial, dan

sumber daya manusia dalam pola spasial yang menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk: menyediakan pendapatan untuk seluruh anggota keluarga, pendidikan, kewirausahaan, tenaga kerja, dan kewarganegaraan, akses terhadap pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi regional dan ekonomi masyarakat yang mampu menciptakan kesempatan ekonomi baru, kepemimpinan dan struktur organisasi yang mampu menjamin ekonomi dan kesehatan sosial, lingkungan dan sumber daya alam yang sehat. Kalau demikian pembangunan perdesaan bersifat multidimensi. Glickman (1960), menyatakan efek ganda di perdesaan dapat diciptakan oleh permintaan sektor di luar perdesaan dan juga belanja publik serta transformasi ke perdesaan, oleh karena itu dipandang perlu adanya stimulus baik berupa kemudahan/akses ke desa maupun arus modal yang masuk ke desa guna meningkatkan penghidupan di perdesaan. Pembangunan perdesaan sangatlah penting seperti yang diungkapkan Xiaoping (1978) bila ingin menguasai suatu negara kuasailah desa. Artinya perdesaan identik dengan pertanian sangatlah penting bagi kelangsungan sebuah bangsa.

Pembangunan wilayah atau desa, membutuhkan pembiayaan baik internal maupun eksternal. Salah satu sumber pembiayaan eksternal bersumber dari APBN dan APBD melalui dana transfer keuangan pusat-daerah dan desa. Peran pemerintah yang memiliki fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi (Musgrave, 1989). Fungsi distribusi mengharuskan pemerintah menciptakan pemerataan dan keadilan, dalam rangka fungsi tersebut salah satunya dengan transfer

dana melalui dana desa sehingga diharapkan kesenjangan antar wilayah/desa bisa dipersempit.

Dana desa yang dikucurkan ke desa-desa setidaknya telah mampu menurunkan kemiskinan di desa Azwardi & Sukanto (2014), Gurning (2020), dan Arfiansyah, (2020). Dilihat dari manfaat dana desa, Saggaf *et al* (2018) mengungkapkan dana desa sangat bermanfaat bagi peningkatan status desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dijumpai pula beberapa kajian yang menunjukkan beberapa desa masih sulit berkembang walaupun dana desa telah dikucurkan (Tambunan *et al*, 2020). Bahkan dana desa tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan (Gusti, Agustar & Osmet, 2020).

10 Menurut Bank Dunia kemiskinan adalah hal yang berkenaan dengan ketiadaan tempat tinggal, sakit dan tidak mampu berobat kedokter, tidak mampu untuk sekolah, dan tidak tahu baca tulis, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki akses air bersih. Kemiskinan merupakan suatu keadaan/kondisi yang dialami seseorang dimana ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal kebutuhan pokok lainnya. Definisi kemiskinan dapat dipilih menjadi dua aspek, yaitu aspek primer, meliputi miskin berupa harta (aset), pengetahuan, organisasi politik, dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder, meliputi kemiskinan terhadap sumber-sumber keuangan, jaringan sosial, dan informasi (Arsyad, 2010: 299).

Masalah kemiskinan sangatlah kompleks, Nurse dalam Sagir (2009) mengungkapkan adanya lingkaran kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Masyarakat perdesaan kekurangan modal yang

berdampak pada produktivitas rendah, rendahnya produktivitas berakibat pada pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah berpengaruh pada tabungan juga rendah dan investasi rendah. Di lain pihak, kekurangan investasi SDM berdampak ke penguasaan IPTEK yang rendah dan produktivitas turun, hal tersebut memperburuk kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Secara garis besar faktor penyebab kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) kemiskinan alami (*natural*), kemiskinan yang disebabkan kondisi geografis wilayah seperti keadaan alam yang gersang, sulit dijangkau (pengunungan, rawa dan lain sebagainya).¹³ Misalnya desa-desa miskin di kaki gunung, dan wilayah perairan. 2). **Kemiskinan budaya (*cultural*)**, **kemiskinan yang disebabkan kondisi sosial budaya penduduk di daerah itu mendukung kemiskinan.** 3). **Kemiskinan struktur (*structural*)** merupakan **kemiskinan yang disebabkan keadaan struktur pemerintahan, struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin sebagai hasil dari kebijakan pemerintah.**

3. Hasil Kajian

Wilayah perdesaan di Indonesia masih memiliki jumlah penduduk miskin lebih banyak di dibandingkan dengan wilayah perkotaan, sehingga tidak jarang banyak yang beranggapan bahwa perdesaan merupakan penyumbang utama terhadap angka kemiskinan secara nasional. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di perdesaan, salah satunya dikarenakan keterbatasan

lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja, sektor pertanian menjadi tumpuan utama penyerapan tenaga kerja, rendahnya kepemilikan lahan usaha tani sehingga banyak yang menjadi buruh dengan upah yang rendah, serta masyarakat wilayah perdesaan cenderung memiliki pengetahuan dan skill yang rendah (Gusti *et al.*, 2020:2). Deaton dan Nelson (1992) menyatakan pembangunan wilayah perdesaan tercermin dari alokasi fisik (infrastruktur), sosial dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, tidak heran bila fokus pembangunan wilayah perdesaan adalah infrastruktur fisik, sosial dan sumberdaya manusia. Ketiga unsur ini tercermin dari dimensi pembentuk Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Prioritas penggunaan Dana Desa diatur berdasarkan Permendesa PDTT, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa, yaitu 1) Prinsip keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakannya, 2) Prinsip kebutuhan prioritas, yaitu dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan sebagian besar masyarakat Desa, 3) Prinsip Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asasi usul dan kewarganegaraan lokal berskala Desa, 4) Prinsip partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat, 5) Prinsip Swakelola dan berbasis sumber daya Desa, pelaksanaan secara mandiri melalui pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal, 7) Prinsip Tipologi Desa,

yaitu dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Selain itu, prioritas dana desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, 1) Sarana dan prasarana Desa seperti, dalam lingkungan pemukiman dengan pembangunan rumah sehat, tempat pembuangan sampah, drainase, dalam bidang transportasi antara lain pembangunan jalan pemukiman, jalan Desa, jembatan Desa, dan tambatan perahu, dalam bidang energy antara lain pembangunan pembangkit listrik, tenaga disel, dan distribusi tenaga listrik, dan dalam bidang informasi & komunikasi antara lain membangun jaringan internet, telepon umum, dan website desa. 2) Sarana prasarana sosial pelayanan dasar, yaitu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan menyediakan air bersih, polindes, posyandu, dan MCK, serta dalam bidang pendidikan dengan menyediakan perpustakaan Desa. 3) Sarana prasarana usaha ekonomi Desa, yaitu usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain dengan menyediakan embung Desa, irigasi Desa, kapal penangkap ikan, dan kandang ternak dan usaha ekonomi pertanian lainnya yang di fokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi pemasaran antara lain lumbung Desa, penggilingan padi, pondok wisata dan pasar Desa. 4) Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup, yaitu meliputi kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan kejadian luar biasa lainnya, dan pelestarian lingkungan hidup. 5) Sarana dan prasarana lainnya.

Perkembangan pembangunan fisik desa selama tahun 2015-2017 menunjukkan perbaikan, hal ini terlihat dari terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan Desa, 22.616 unit sambungan air bersih, 914 ribu meter jembatan, 2.201 unit tambatan perahu, 14.597 unit PAUD, 4.004 unit polindes. 3.106 pasar Desa, 19,485 unit sumur, 103.405 unit drainase dan irigasi, 10.964 unit posyandu, dan 1.338 unit embung Desa.

Oleh karena itu, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk kegiatan non-fisik terutama pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani hal-hal berikut:

- 1). Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa,
- 2). Pengembangan kapasitas masyarakat Desa,
- 3). Pengembangan ketahanan masyarakat Desa,
- 3). Pengembangan system informasi Desa,
- 4). Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat desa penyandang disabilitas,
- 5). Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa / BUMDesa bersama,
- 6). Dukungan pengelolaan usaha ekonomi,
- 7). Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

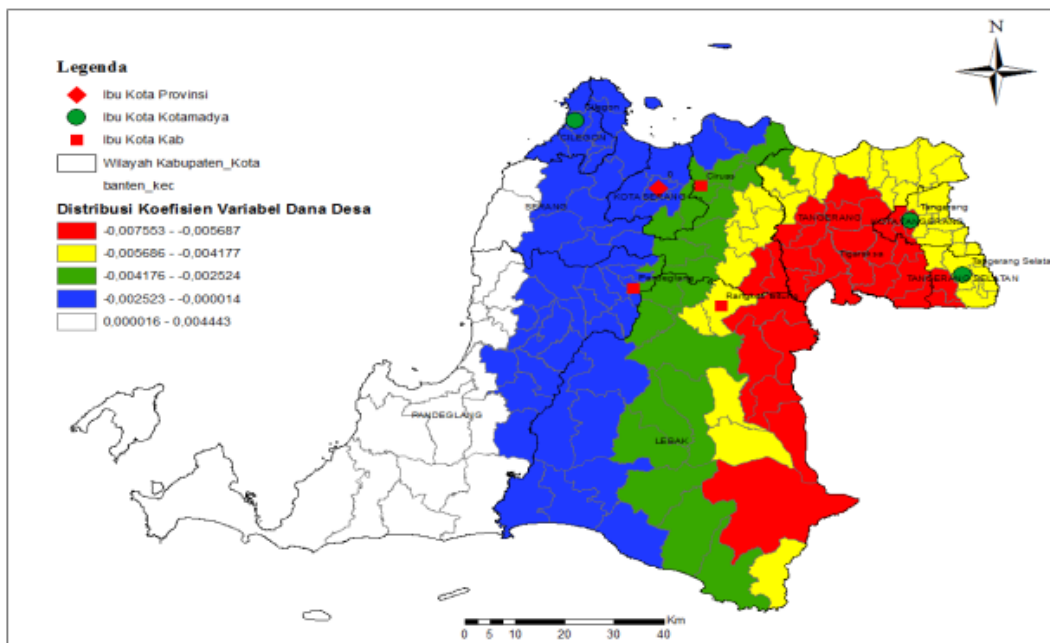
3.1 Pengurangan Kemiskinan

Dana Desa dirasakan mamfaatnya, dan berkontribusi dalam penurunan kemiskinan di desa. Hasil penelitian Sukanto, *et al* (2018) menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Pendekatan *geographical weighted regression* yang digunakan juga mengungkapkan dana desa telah mampu mengurungi tingkat kemiskinan di 121 kecamatan di Provinsi Banten. Dana desa yang diberikan pemerintah telah digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan dana desa belum mampu mengentaskan kemiskinan di 17 kecamatan terutama di wilayah-wilayah desa sangat tertinggal. Kondisi ini disebabkan oleh penggunaan dana desa yang diterima sebagian besar desa dipergunakan untuk membuka akses bagi desa-desa tertinggal terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan. Diketahui desa-desa yang ada di 17 kecamatan yang relatif tertinggal merupakan daerah *hinterland* Kota Pandeglang maupun Kota Serang sehingga pemenuhan kebutuhan untuk pembangunan dilakukan di pusat kota. Akibatnya terjadi peningkatan arus modal dari desa ke pusat kota dan terjadi *backwash effect*. Artinya, modal yang mengalir ke desa tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat (*capital outflow*) atau ada indikasi kebocoran wilayah (Rustiadi *et al.* 2011).

Beberapa kajian menunjukkan pembangunan infrastruktur seperti pisau bermata dua, satu sisi dapat mendongkrak tingkat kesejahteraan dan sisi ini dapat menyebabkan pengurasan sumber daya yang berdampak pada meingkatnya prose “pemiskinan”.

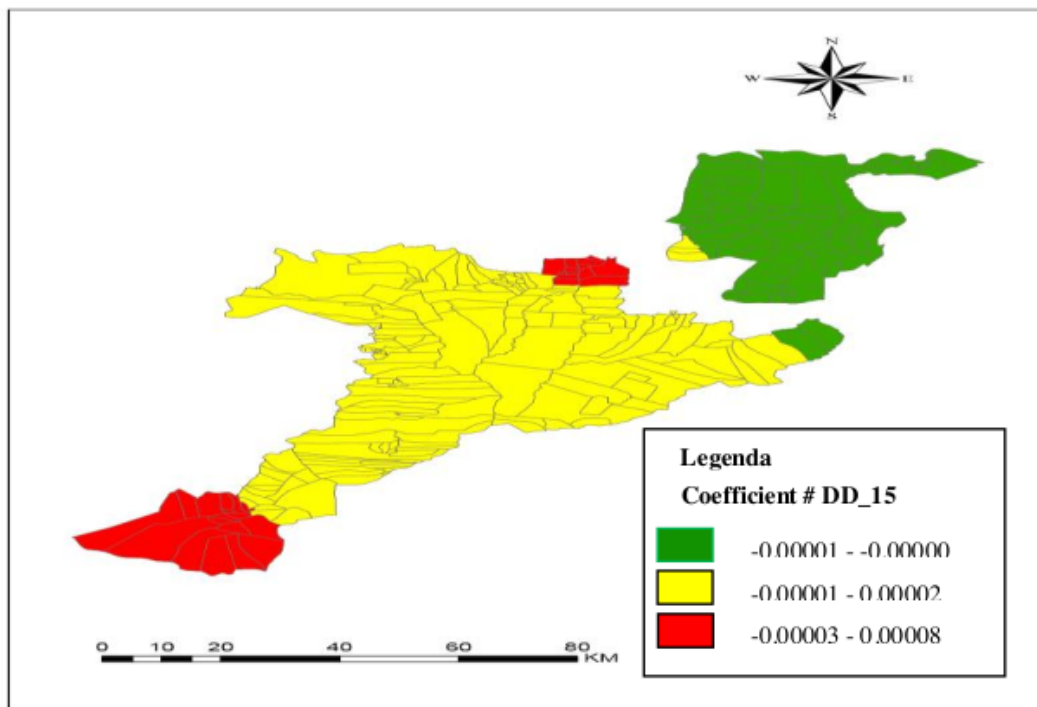
Pemikiran tersebut didukung oleh Yustika dan Baks (2015), pembangunan infrastruktur (jalan) memang sangat penting, akan tetapi harus dibangun setelah situasi ekonomi di suatu tempat (daerah atau desa) telah mapan. Masyarakat lokal yang sudah mapan akan mampu bersaing dengan pelaku ekonomi dari luar daerah. Namun, jika masyarakat lokal belum siap sebaiknya isolasi ekonomi dilakukan. Fenomena *Brain Drain* seringkali terjadi dalam pembangunan wilayah desa. Lancarnya arus barang, modal dan jasa mengakibatkan migrasi sumber daya desa ke kota terutama SDM yang berkualitas. Hasil studi Yudha *et al.* (2018) merekomendasikan agar pemanfaatan dana desa menjadi lebih efisien dan tepat sasaran diperlukan optimalisasi fungsi pendamping desa.



Sumber: Sukanto *et al.* 2018

Gambar 8.3 Sebaran Koefisien Dana Desa terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten

Kajian serupa dilakukan oleh Indriani, Azwardi dan Sukanto (2020) dengan menggunakan pendekatan yang sama menyimpulkan dana desa belum secara optimal berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim. Secara rinci dijelaskan dana desa mampu mengurangi tingkat kemiskinan di 40 desa di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Belida Darat, Kecamatan Lembak, Kecamatan Lubai, Kecamatan Muara Belida, dan Kecamatan Sungai Rotan. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dana desa digunakan untuk hal-hal produktif seperti pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, pengembangan kawasan wisata melalui BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)



Sumber: Indriani, Azwardi, Sukanto, 2020

Gambar 8.4 Sebaran Koefisien Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kabupaten Muara Enim

3.2 Pengembangan Wilayah

Dana desa digunakan untuk penataan dan pengembangan wilayah, dalam hal pengembangan wilayah dapat dilihat dari membaiknya nilai IDM. IDM dijadikan salah satu tolok ukur perkembangan wilayah. Dimensi-dimensi sebagai indikator pembentuk IDM merujuk pada pembangunan desa. Misalnya Indeks Ketahanan Sosial yang memuat Tingkat Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial dan Permukiman. Sementara itu Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Perdagangan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah. Selain itu, guna keberlangsungan pembangunan di desa, diukur menggunakan kualitas lingkungan, bencana alam dan tanggap bencana.

Data publikasi Kementrian Desa menunjukkan penggunaan Dana Desa memberikan manfaat terhadap pengembangan wilayah Desa di Indonesia yang dilihat melalui peningkatan status Desa. Pada tahun 2015 terdapat 13.453 Desa yang berstatus sebagai Desa sangat tertinggal, 33.592 Desa yang berstatus sebagai Desa tertinggal, 22.882 Desa yang berstatus sebagai Desa berkembang, 3.608 Desa yang berstatus sebagai Desa maju, dan 179 Desa yang berstatus sebagai Desa mandiri. Kemudian di tahun 2020 terjadi penurunan jumlah Desa yang berstatus sebagai Desa sangat tertinggal sebesar 18,11 persen menjadi 2.437 Desa, kemudian Desa yang berstatus sebagai Desa tertinggal juga turut mengalami penurunan sebesar 41,39 persen menjadi 13.905 Desa, sementara untuk Desa yang berstatus sebagai Desa berkembang pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 42,58 persen menjadi 39.850 Desa, sama seperti Desa

berkembang, Desa yang berstatus sebagai Desa maju juga mengalami peningkatan sebesar 69,70 persen menjadi 11.900 Desa, kemudian jumlah Desa mandiri juga mengalami kenaikan sebesar 89,7 persen menjadi 1.742 Desa (Tabel 1.1).

Tabel 8.1

Perkembangan Tipologi Desa di Indonesia Tahun 2015 dan 2020

Status Desa	2015	2020	Pengurangan/ Penambahan Desa
Desa Sangat Tertinggal	13.453	2.449	(11.004)
Tertinggal	33.592	13.939	(19.653)
Berkembang	22.882	39.852	16.970
Maju	3.608	11.900	8.292
Mandiri	179	1.742	1.563

Perubahan status desa tahun 2018 dan tahun 2020 di Pulau Sumatera menunjukkan klasifikasi sangat tertinggal tersisa 894 desa, sementara kategori tertinggal menurun menjadi 11.274 desa. Dua klasifikasi ini identik dengan “kantong” kemiskinan. Kategori desa berkembang mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu sebesar 56,27 persen atau meningkat dari 8.565 desa menjadi 13.386 desa. Desa dengan klasifikasi maju naik dari 908 desa menjadi 2.457 desa (170,59 persen), dan desa mandiri meningkat dari 49 desa menjadi 283 desa (477,55 persen). Secara spasial, provinsi yang memiliki desa sangat tertinggal yaitu provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.162 desa pada tahun 2018, dan menurun separuhnya menjadi 623 desa di tahun 2020. Sementara itu, kategori desa tertinggal terbanyak di Provinsi

Aceh, tahun 2018 sebanyak 3.624 desa menurun menjadi 2.404 desa. Kotegori desa maju atau Nagari Maju terbanyak di Provinsi Sumatera barat yaitu sebesar 203 desa dan meningkatkan menjadi 348 desa tahun 2020. Desa mandiri, menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, masing-masing provinsi mencatatkan perkembangan yang baik. Provinsi Jambi merupakan provinsi yang memiliki loncatan terbesar dalam peningkatan jumlah desa mandiri. Bila pada tahun 2018 hanya 6 desa, meningkat menjadi 87 desa di tahun 2020, urutan berikutnya adalah Provinsi Riau meningkat dari 4 desa menjadi 61 desa. Fakta ini menguatkan argumen bahwa dana desa telah mampu mendorong perkembangan wilayah desa, walaupun disadari ada faktor lain yang ikut berperan dalam peningkatan status tersebut.

**Tabel 8.2 Perkembangan Tipologi Desa di Regional Sumatera
2018 dan 2020**

PROVINSI	Perubahan Status IDM dari 2015-2020 Desa-Desa di Pulau Sumatera									
	SANGAT TERTINGGAL		TERTINGGAL		BERKEMBANG		MAJU		MANDIRI	
	2018	2020	2018	2020	2018	2020	2018	2020	2018	2020
ACEH	560	205	3.624	2.404	2.138	3.458	161	397	13	32
SUMUT	1.162	623	2.760	1.831	1.397	2.726	96	228	2	9
SUMBAR	19	4	189	65	505	466	203	348	12	45
RIAU	113	35	683	35	728	944	63	287	4	61
JAMBI	53	2	551	154	676	871	113	285	6	87
SUMSEL	181	14	1.639	516	981	2.052	51	264	1	7
BENGKULU	41	5	614	290	611	908	71	129	4	9
LAMPUNG	113	6	1.086	6	1.144	1.812	86	370	6	21
BABEL	0	0	17	0	240	102	51	102	1	11
KEPRI	6	0	111	34	145	47	13	47	0	1
JUMLAH	2.248	894	11.274	5.335	8.565	13.386	908	2.457	49	283

Sumber: <https://idm.kemendes.go.id>, 2020 (diolah)

Pada tingkat mikro daerah, Dana Desa mampu berperan dalam pengembangan wilayah melalui peningkatan status Desa di Kabupaten Muara Enim yang pada tahun 2014 memiliki 18 Desa yang berstatus sebagai Desa sangat tertinggal turun menjadi 6 Desa pada tahun 2018, Desa yang berstatus sebagai Desa tertinggal sebanyak 145 Desa turun menjadi 115 Desa di tahun 2018, kemudian Desa yang berstatus sebagai Desa berkembang mengalami peningkatan, yang semula sebanyak 78 Desa di tahun 2014 menjadi 115 Desa di tahun 2018, Desa yang berstatus sebagai Desa maju juga ikut mengalami kenaikan yang semula 4 Desa, kemudian menjadi 5 Desa di tahun 2018. Sedangkan hasil analisis pola spasial sebaran penduduk miskin di kabupaten muara enim bersifat mengelompok (*Clustered*) dan Dana Desa memiliki pengaruh yang beragam pada setiap lokasi pengamatan (Indriani, Azwardi, Sukanto; 2020).

4. Kesimpulan

Dana Desa memberikan manfaat bagi masyarakat, antara lain terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, sambungan air bersih, tambatan perahu, drainase dan irigasi, posyandu, dan embung Desa. Selain itu, Dana Desa juga bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan, menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Namun demikian, secara spasial diperoleh hasil dana desa belum mampu mengurangi kemiskinan.

Penggunaan Dana Desa juga bermanfaat terhadap pengembangan wilayah Desa di Indonesia yang dilihat melalui peningkatan status desa (Indeks Desa Membangun). Tahun 2015 jumlah Desa di Indonesia yang berstatus sebagai Desa sangat tertinggal sebanyak 13.453 kemudian mengalami penurunan menjadi 2.437 Desa, Desa yang berstatus sebagai Desa tertinggal sebanyak 33.592 Desa dan mengalami penurunan menjadi 13.905 Desa, Desa yang berstatus sebagai Desa berkembang sebanyak 3.608 Desa dan meningkat menjadi 39.850 Desa di tahun 2020. Selanjutnya, Desa yang berstatus sebagai Desa maju juga mengalami peningkatan dari yang semula 3.608 Desa menjadi 11.900 Desa, dan Desa yang berstatus sebagai Desa mandiri yang semula sebanyak 179 Desa menjadi 1.742 Desa.

Oleh karena itu, optimalisasi dana desa memerlukan sinergitas Dana Desa, Bumdes, dan Koperasi Perdesaan agar kemajuan desa dapat berkesinambungan. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas petani, nelayan dan warga perdesaan agar mempunyai akses dalam pemanfaatan infrastruktur fisik, akses pasar dan modal sehingga fenomena *brain drain* dan eksploitasi sumber daya alam desa dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah (2020). Dampak dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*,1(1), 91-106.
- Arsyad L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Azwardi, Sukanto. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 12 (1). Hal 29-41.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Presentase Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2020*.
- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*. Terjemahan. LP3ES. Jakarta
- Deaton B, Nelson G. (1992). *Conceptual underpinnings of policy analysis for rural development*. *Southern J. Agric. Econ*. 24: 87-99.
- Fauzi A. (2010). *Landasan Pembangunan Perdesaan*. Dalam *Pembangunan Perdesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. IPB Press. Bogor.
- Gurning, (2020). Analisis pengaruh dana desa terhadap pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara, 3(1), 27-41.
- Gusti Y, Agustar A & Osmet (2020). Pemanfaatan dana desa dan kaitannya dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(2), 265-285.
- Indriani W, Azwardi, Sukanto. (2020). Manfaat dana desa dalam

- pengembangan wilayah dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2019). Dana Desa untuk Mendukung Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan BUMDesa.
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2020) Indeks Desa Membangun Tahun 2015-2020
- Kementrian Keuangan RI. (2020).Data Dana Desa Tahun 2015-2020.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Jakarta
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Saku Dana Desa. Jakarta.
- Lowe P, Ray C, Wood N, Woodward R. (1998). Participation in Rural Development: a Review of European Experience. Centre for Rural Economy, University of Newcastle, Newcastle, England.
- Musgrave R, Musgrave P. (1989). Public Finance in Theory and Practice. New York (US): McGraw-Hill.
- Muta'ali L. (2014). Perencanaan Pengembangan Wilayah Berbasis Pengurangan Risiko Bencana. Badan Penerbit Fakultas Geografi. Universitas Gadjah Mada
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Desa. Jakarta.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Permendesa PDTT Nomor 25 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Permendesa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju DR. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta (ID): Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Jakarta.

Saggaf A., Nawawi Z, Muslim A, Marwa T, Azwardi, Mukhtaruddin, Sukanto, Mukhlis, Thamrim KMH, Bashir A, Kalsum U, Farhan M, Patmawati, Marissa F, Atiyatna DP, Hamidi I. (2018). Manfaat Dana Desadi Provinsi Sumatera Selatan. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.

Sagir S. (2009). Kapita Selekta Ekonomi Indonesia. Jakarta (ID): Kencana Prenada Media Grup.

Sari RN, Ribawanto H. & Said H. (2020). Pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. Jurnal Administrasi Publik, 3(11), 1880-1885.

Sukanto, Juanda B, Fauzi A, Mulatsih S. (2018). Dampak Dana Transfer dan Peran Kelembagaan Terhadap Kinerja

Pembangunan di Provinsi Banten. Disertasi. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Tambunan BH, Sihombing M. & Harahap H. (2020). Peranan dana desa dalam pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolang Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Perspektif*. 9(2), 438-446.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Yustika AE, Baks R. (2015). *Konsep Ekonomi Kelembagaan Perdesaan, Pertanian dan Kedaulatan Pangan*. Malang (ID): Empat Dua.

Yudha EP, Juanda B, Kolopaking LM, Kinseng RA. (2018). Pengukuran pengaruh belanja desa terhadap kinerja pembangunan desa dengan menggunakan geographically weighted regression. *TATALOKA*. 20(1): 23-34.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2016). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Ed. Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasang, I. (2016). ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN PERGESERAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008-2012. *Jurnal Economix*, 4(1), 177–189.
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2019). *Ekonomika Regional: Teori dan Aplikasi*. Depok: Rajawali Pers.
- Ma`mun, D., & Irwansyah, S. (2013). ANALISIS PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI DAN IDENTIFIKASI SEKTOR POTENSIAL WILAYAH PENGEMBANGAN (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 2(1).
- Oktarina, E., & Satrianto, A. (2019). Analisis Sektor Unggulan Dan Pergeseran Pangsa Sektor-sektor Ekonomi Di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 613–622.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sufriadi, D. (2017). Analisis Transformasi Struktural Perekonomian Aceh. *Jurnal E-KOMBIS*, 3(2).

- Sunoto, Indraswanti, B. I. E., & Tarsilohadi, E. R. (2020). Analisis pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi kabupaten induk di provinsi Bengkulu 1,2,3. *THE JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT*, 2(1), 54–69.
- Supianto, Urep, S. A., & Putra, W. (2017). Pengembangan Sektor Ekonomi Daerah Tertinggal di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(3), 251–281.
- Tambunan, T. (2003). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional*. Medan: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael, P., & Stephen, C. S. (2008). . 2008. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi Kesembilan*. Erlangga: Jakarta. Jakarta: Erlangga.
- Wiwekananda, I. B. P., & Utama, I. M. S. U. (2016). Transformasi Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan di Kabupaten Buleleng Periode 2008-2013. *JURNAL EKONOMI KUANTITATIF TERAPAN*, 9(1), 37–45.
- Yulianita, A. (2010). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Di Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2).

Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	bpmpd.bogorkab.go.id Internet Source	1%
2	elibrary.almaata.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	1%
4	jta.lan.go.id Internet Source	1%
5	bachtiarbikkok.blogspot.com Internet Source	1%
6	repository.unsri.ac.id Internet Source	1%
7	lemlit.unsri.ac.id Internet Source	1%
8	lppm.unsri.ac.id Internet Source	1%
9	adoc.pub Internet Source	1%
10	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	1%
11	banjar.bulelengkab.go.id Internet Source	1%
12	id.berita.yahoo.com Internet Source	1%

iksankurniawan55.blogspot.com

13

Internet Source

1 %

14

keluhkesah.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On